PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jln. Bukit Batu Kompleks Perkantoran PEMDA Talaud – Melonguane.
E-mail : bapelitbang@talaudkab.go.id

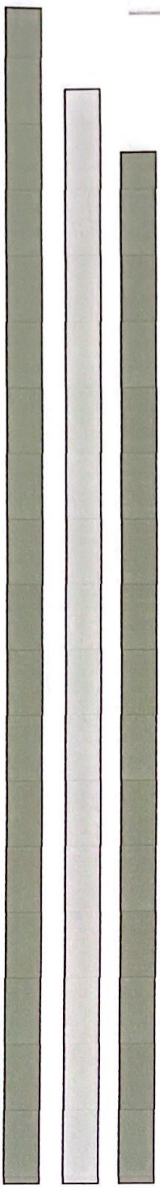

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN KINERJA TAHUN 2022

KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Maksud dan Tujuan 1

C. Sistimatika Penyusunan Laporan 1

BAB II KONDISI UMUM SKPD 3

A. Gambaran Kondisi Umum 3

B. Struktur Organisasi 3

C. Tugas Pokok dan Fungsi 5

BAB III VISI MISI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD 10

A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 10

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Talaud 10

C. Strategi dan Kebijakan 11

BAB IV PROGRAM KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 12

A. Rincian Prioritas Program dan Kegiatan Indikatif 13

B. Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Talaud 13

C. Realisasi Anggaran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan 21

D. Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Tahun Anggaran 2022 26

BAB V CAPAIAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI TAHUN ANGGARAN 2022 28

A. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan BAPELITBANG 28

BAB VI PENUTUP 41

A. Kesimpulan 41

B. Saran 41

KATA PENGANTAR

Pertama-tama mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa kita senantiasa diberikan kemampuan dan kekuatan sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsi yang sudah menjadi kewajiban dalam mengimplementasikan penjabaran program dan kegiatan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2022.

Laporan pelaksanaan kinerja, program dan kegiatan ini juga merupakan tanggung jawab dari SKPD teknis didalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan.

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KAB. KEPL. TALAUD,

SPEN T. BAWANGUN, ST, MT
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197330707 200003 1 005

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan paradigma baru bagi pengembangan otonomi yang sebenarnya. Dengan Undang-Undang ini pengembangan otonomi pada daerah kabupaten dan kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan keanekaragaman daerah. Daerah akan mempunyai kewenangan untuk merencanakan, menggunakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber penerimaan daerah kepada masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sejalan dengan peran yang harus dilakukan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan di daerah harus ditunjang oleh SKPD-SKPD yang ada dan saling bekerja sama dibidang Pembangunan Daerah salah satunya Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Talaud.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan ini dimaksud untuk menggambarkan kinerja yang telah dilakukan oleh setiap bidang pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dari masing-masing bidang pada setiap pelaksanaan pekerjaan dan mengukur keberhasilan program dan kegiatan dari masing-masing pada pencapaian tugas demi peningkatan kualitas pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat serta bertujuan untuk memantapkan pelaksanaan administrasi kinerja instansi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Talaud.

C. Sistimatika Penyusunan Laporan

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Maksud dan Tujuan

C. Sitimatika Penyusunan Laporan

BAB II : KONDISI UMUM SKPD

A. Gambaran Kondisi Umum

B. Struktur Organisasi

C. Tugas Pokok dan Fungsi

BAB III : VISI DAN MISI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Talaud

C. Strategi dan Kebijakan

BAB IV : PROGRAM KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

A. Rincian Prioritas Program dan Kegiatan Indikatif

B. Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Talaud

C. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

D. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Talaud

BAB V : CAPAIAN PELAKSANAAN TUGAS SEMESTER I DAN SAMPAI TAHUN ANGGARAN 2022

A. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

B. Hambatan dan Permasalahan Pelayanan

BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

BAB II
KONDISI UMUM SKPD

A. Gambaran Kondisi Umum

Pada Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dalam kegiatannya meliputi beberapa tahapan yaitu tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pembukuan, Pelaporan, Pertanggung-jawaban, dan Pengendalian/Pengawasan, yang masing – masing tahap memiliki input, proses dan output. Hal ini juga dapat didukung oleh regulasi yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Surat Edaran, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP).

Pada tahap Perencanaan input yang dimaksudkan adalah hasil aspirasi masyarakat yang telah dilakukan oleh DPRD dan Eksekutif, kemudian aspirasi-aspirasi tersebut dijabarkan dalam usulan kegiatan/aktivitas SKPD yang diproses dengan standar – standar yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga setiap aktivitas yang diarahkan mencerminkan target kinerja dan anggaran yang diarahkan juga mencerminkan anggaran kinerja karena telah diproses secara wajar. Hasil akhir dari terkumpulnya Rencana Kerja Anggaran di setiap SKPD akan menghasilkan RAPBD yang kemudian diproses lagi dan ditetapkan oleh DPRD sebagai Output Perencanaan berupa APBD.

Pada tahap pelaksanaan inputnya adalah output dari tahap perencanaan yaitu berupa APBD kemudian dalam tahap pelaksanaan ini prosesnya adalah APBD yang sudah ditetapkan kemudian dilaksanakan dengan menggunakan sistem akuntansi yang sudah disesuaikan untuk menghasilkan dokumentasi eksekutif baik berupa laporan bulanan, laporan triwulanan, laporan semesteran, maupun laporan tahunan sebagai laporan pertanggungjawaban.

Pencapaian Kinerja Pelayanan dan Anggaran SKPD

Kinerja pelayanan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi dapat dilihat dari target dan realisasi anggaran belanja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan belanja sebesar Rp.4.887.706.500,- realisasi sebesar Rp.4.742.197.761,- atau 97,02%.

B. Struktur Organisasi

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan

dan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan sebagai berikut :

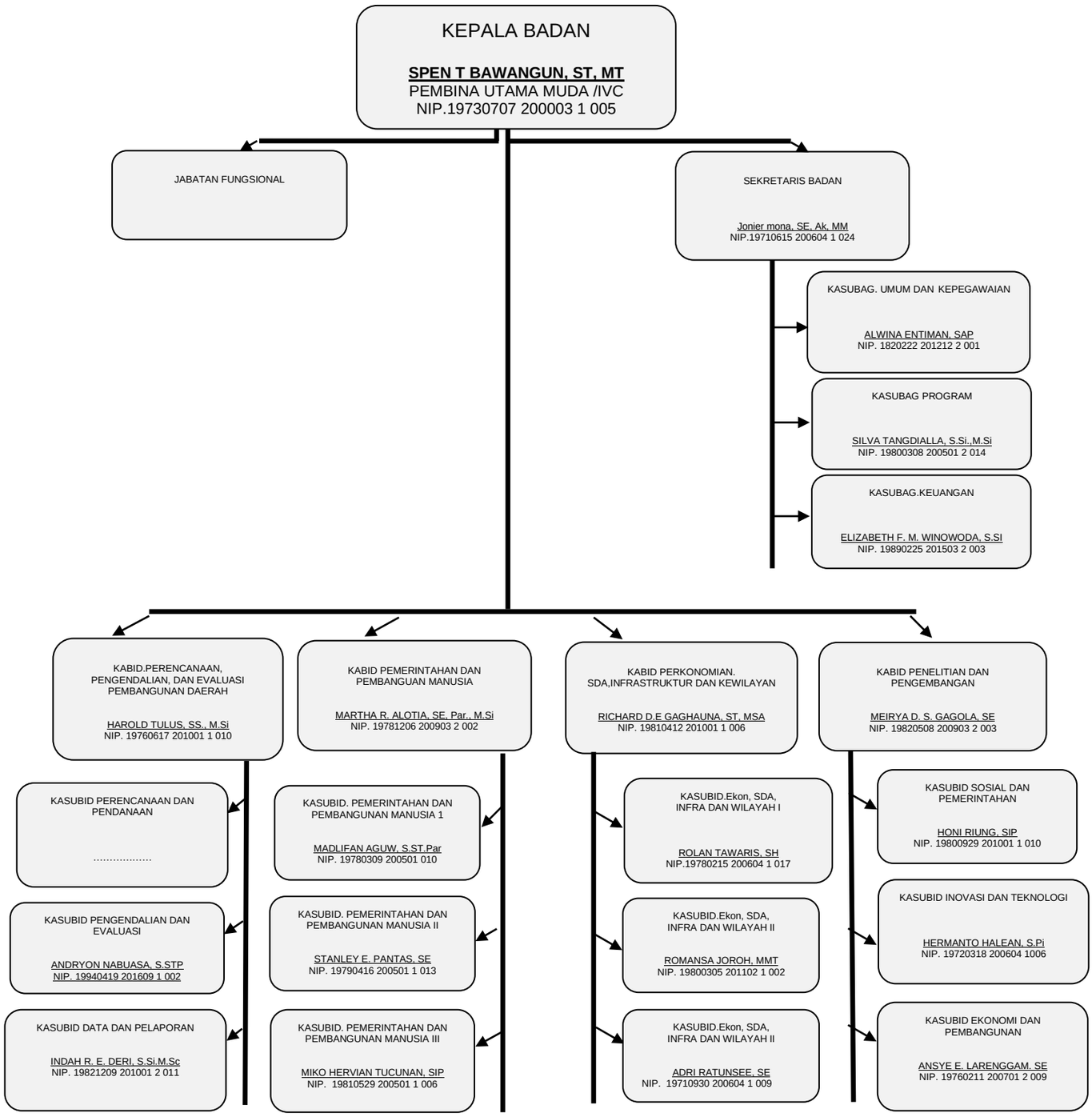

D. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perencanaan dan Penelitian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Peraturan Bupati ini, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
b. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan kabupaten;
c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintah kabupaten;
d. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
f. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan daerah di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
g. pelaksanaan fasilitasi inovasi daerah;
h. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintah kabupaten;
i. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup kabupaten; dan
j. pelaksanaaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan fungsi bidang keahlian masing-masing berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

a. Setiap kelompok fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala badan.
b. Jumlah jabatan Fungsional serta pembinaannya diatur sesuai dengan pereturan perundang –undangan yang berlaku.
c. Jenis dan jenjang jabatan fungsional serta pembinaannya diatur sesuai dengan pereturan perundang –undangan yang berlaku.

Tata Kerja

a. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub-Bagian, Kepala UPTD serta Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik di dalam maupun di luar Lingkungan Dinas.

b. Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.

Tabel 1

Komposisi pegawai pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

No.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat	
	Pangkat/Gol	**Jumlah (orang)**
1.	Pembina Utama Muda/ IVc	1
2.	Pembina Tingkat I/ IVb	2
3.	Pembina / IV a	3
4.	Penata Tingkat I / III d	9
5.	Penata / III c	5
6.	Penata Muda Tk I / IIIb	1
7.	Penata Muda / IIIa	7
8.	Pengatur Tk I/ II d	2
9.	Pengatur / II c	2
10.	Pengatur Muda Tkt.I/IIb	1
	Jumlah	**31**

Tabel 2

Data PNS Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Menurut Pendidikan

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan									Jumlah
S2	S1	D4	D3	D2	D1	SMA	SMP	SD	
8	18	0	1	0	0	4	0	0	**31**

Tabel 3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

No.	Nama jabatan	Jumlah (orang)
1.	Kepala Badan	1
2.	Sekretaris	1
3.	Kepala Bidang	4
4.	Kepala Sub bagian	2
5.	Pejabat Fungsional	12
6.	Pejabat Pelaksana	11
	Jumlah jabatan	**31**

Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Talaud sebanyak 32 orang, sebagai berikut:

Tabel 4

Daftar Pegawai Negeri Sipil

NO	PEJABAT FUNGSIONAL STRUKTURAL	PANGKAT/ GOL.	JABATAN
	KEPALA BADAN		
1	**SPEN T. BAWANGUN, ST., MT**	Pembina Utama Muda	Kepala Badan
	19730707 200003 1 005	IV/C	
B	**SEKRETARIS**		
1	**JONIER MONA, SE.Ak., MM**	Pembina TKT I	Sekretaris
	19710615 200604 1 024	IV/B	
C	**KEPALA BIDANG**		
1	**YERI LOSOH, S.IP**	Pembina Tkt I	Kabid Penelitian Dan Pengembangan
	19761110 200312 1 009	IV/B	
2	**MARTHA R ALOTIA, SE.Par., M.Si**	Pembina	Kabid Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia
	19781206 200903 2 002	IV/A	
3	**HAROLD T. TULUS, SS., M.Si**	Penata Tkt I	Kabid Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
	19760617 201001 1 010	III/D	
4	**REAGEN ADE PUTRA, SH**	Penata Tkt I	Kabid Perekonomian Sumber Daya Alam, Infrastruktur Dan Kewilayahan
	19860111 201001 1 005	III/D	
D	**PEJABAT FUNGSIONAL STRUKTURAL**		
1	**SILVA TANGDIALLA, S.Si.,M.Si**	Pembina	Perencana Ahli Muda
	19800308 200501 2 014	IV/A	
2	**INDAH R. E. DERI, S.Si,.M.Sc**	Pembina	Perencana Ahli Muda
	19821209 201001 2 011	IV/A	
3	**HERMANTO M. HALEAN, S.Pi**	Penata Tkt I	Analis Pemanfaatan Iptek
	19720318 200604 1 006	III/D	Ahli Muda
4	**ROLAN TAWARIS, SH**	Penata Tkt I	Perencana Ahli Muda
	19780215 200604 1 017	III/D	
5	**ADRI RATUNSEE, SE**	Penata Tkt I	Perencana Ahli Muda
	19710930 200604 1 009	III/D	
6	**ANSYE E. LARENGGAM, SE**	Penata Tkt I	Penata Penerbitan Ilmiah
	19760211 200701 2 009	III/D	Ahli Muda
7	**HONI RIUNG, S.IP**	Penata Tkt I	Peneliti Ahli Muda
	19800929 201001 1 010	III/D	

8	**ROMANSA JOROH, MM**	Penata Tkt I	Analis Kebijakan Ahli Muda
	19800305 201102 1 002	III/D	
9	**STANLEY E. PANTAS, SE**	Penata	Analis Kebijakan Ahli Muda
	19790416 200501 1 013	III/C	
10	**MADLIFAN AGUW, SST Par**	Penata	Perencana Ahli Muda
	19780309 200501 1 010	III/C	
11	**MIKO HERVIAN TUCUNAN, SIP**	Penata	Perencana Ahli Muda
	19810529 200501 1 006	III/C	
12	**ALWINA ENTIMAN, SAP**	Penata	Kasubag Umum Dan Kepegawaian
	19820222 201212 2 001	III/C	
13	**ELIZABETH F. M. WINOWODA, S.SI**	Penata	Kasubag Keuangan
	19890225 201503 2 003	III/C	
14	**ANDRYON NABUASA, S.STP**	Penata	Perencana Ahli Muda
	19940419 201609 1 002	III/C	
E	**STAF (Fungsional Umum)**		
1	**FRANS M.TAKASANAKENG, S.Kom**	Penata Muda	Pelaksana
	19940326 201903 1 014	III/A	
2	**LAURA SOJOW, ST**	Penata Muda	Pelaksana
	19871027 201903 2 008	III/A	
3	**LIVIA WALESASI, SE**	Penata Muda	Pelaksana
	19911231 201903 2 025	III/A	
4	**ABDISAN BESINUNG,SST**	Penata Muda	Pelaksana
	19900411 202012 1 004	III/A	
5	**YOEDY MAJORE, S.Kom**	Penata Muda	Pelaksana
	19900514 202012 1 001	III/A	
6	**GLORIA PRISILIA RANTUNG,SE**	Penata Muda	Pelaksana
	19950508 202012 2 008	III/A	
7	**YEN YUMELIA MARARU**	Pengatur Tkt I	Pelaksana
	19750614 200701 2 017	II/D	
8	**ANITA SASIIL**	Pengatur Tkt I	Pelaksana
	19780218 200801 2 018	II/D	
9	**ARTER PORODISA MANGAMIS**	Pengatur	Pelaksana
	19850708 201001 1 001	II/C	
10	**ASTRIANI L. LINDO**	Pengatur	Pelaksana
	19740530 201407 2 002	II/C	
11	**NELMI KALUMPIU,Amd.Ak**	Pengatur	Pelaksana

	19871108 202012 2 009	II/C	
Jumlah Pegawai : 31 Orang			

Tabel 5

Pegawai Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Talaud yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan

NO.	Diklat Kepemimpinan	Jumlah	Keterangan
1	Pim II	0	
2	Pim III	2	
3	Pim IV	1	

BAB III
VISI DAN MISI
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud adalah periode 2020-2025 yaitu **Menjadikan Kabupaten Talaud Lebih Diberkati**.

Dalam Renstra Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Talaud yang mengacu pada pencapaian misi ke pertama yaitu : **Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud Yang Bersih.**

- Bersih mengandung makna tidak kotor, tidak tercemar, tulus, ikhlas. Artinya pembangunan manusia dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud berlandaskan pada sifat yang tulus dan bebas dari hal-hal yang sifatnya mengotori makna pembangunan masyarakat itu sendiri.
- Pembangunan yang bersih berangkat dari motor penggerak yang bersih. Untuk itu birokrasi sebagai motor penggerak pembangunan wajib yang dilakukan namanya, reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi yang efektif dan efisien.
  1. Peningkatan kualitas, kapasitas dan kompetensi aparatur sipil negara
  2. Penempatan *Right Man On The Right Job*
  3. Penataan Perangkat Daerah
  4. Peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara dan perangkat desa
  5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntable, transparan dan efektif serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dan bebas korupsi. *Sistem E-Planning, E-Budgeting dan E-Procurement.*
  6. Pembangunan hotline yang bisa menjadi saluran aspirasi masyarakat untuk pelaksanaan pembangunan yang pastisipatif menuju terwujudnya *good governance dan clean goverment*

Tujuan : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintah yang baik dan Bersih.

Sasaran :
1. Terwujudnya manajemen pemerintahan yang efisien, Efektif, akuntabel dan berbasis kinerja.
2. Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang Akuntabel dan berorientasi publik serta efisien Pelayanan publik.
3. Meningkatkan kapasitas dan kinerja aparatur dalam terwujudnya pelayanan publik yang cepat, adil, merata dan bermutu.

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Talaud

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

C. Strategi dan Kebijakan

1. Strategi

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

2. Kebijakan

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi Kabupaten Kepulauan Talaud.

Tabel 6

Tujuan, Sasaran Stategi Bapelitbang dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran Strategi PD	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah NILAI SAKIP	Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	- Peningkatan Perangkat Daerah yang mencapai Target Kinerjanya dengan baik - Peningkatan Nilai SAKIP Perangkat Daerah
	Meningkatkan Kualitas Hasil Kelitbangan dan Inovasi untuk Pengembangan Daerah	- Peningkatan Hasil Penelitian yang direkomendasikan dalam pelaksanaan Pembangunan - Peningkatan Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah - Peningkatan Kebijakan Inovasi yang di terapkan di Daerah

BAB IV
PROGRAM KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

A. Rincian Prioritas Program dan Kegiatan Indikatif

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 7
Rincian Prioritas Program dan Kegiatan Indikatif
Tahun Anggaran 2022

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
									T (Sebelum)					T (Sesudah)					
Urusan	Urusan Pilihan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**														
5	**01**				**PERENCANAAN**				**5.810.254.766**	**0**	**0**	**0**	**5.810.254.766**	**4.626.173.420**	**125.961.580**	**0**	**0**	**4.752.135.000**	**(1.058.119.766)**
5	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**4.134.220.466**	**0**	**0**	**0**	**4.134.220.466**	**3.641.848.220**	**125.961.580**	**0**	**0**	**3.767.809.800**	**(366.410.666)**
5	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**18.664.400**	**0**	**0**	**0**	**18.664.400**	**17.141.500**	**0**	**0**	**0**	**17.141.500**	**(1.522.900)**
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Kepulauan Talaud, Melonguane, Melonguane		9.600.000	0	0	0	9.600.000	9.235.000	0	0	0	9.235.000	(365.000)
5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Kepulauan Talaud, Melonguane, Melonguane		9.064.400	0	0	0	9.064.400	7.906.500	0	0	0	7.906.500	(1.157.900)
5	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**3.498.852.066**	**0**	**0**	**0**	**3.498.852.066**	**2.979.984.426**	**0**	**0**	**0**	**2.979.984.426**	**(518.867.640)**
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Kepulauan Talaud, Melonguane, Melonguane		3.498.852.066	0	0	0	3.498.852.066	2.979.984.426	0	0	0	2.979.984.426	(518.867.640)
5	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**318.051.700**	**0**	**0**	**0**	**318.051.700**	**355.457.294**	**0**	**0**	**0**	**355.457.294**	**37.405.594**
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Kepulauan Talaud, Melonguane, Melonguane		6.019.600	0	0	0	6.019.600	6.019.000	0	0	0	6.019.000	(600)
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Kepulauan Talaud, Melonguane, Melonguane		52.927.300	0	0	0	52.927.300	47.521.000	0	0	0	47.521.000	(5.406.300)
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Kepulauan Talaud, Melonguane, Melonguane		33.625.000	0	0	0	33.625.000	39.580.000	0	0	0	39.580.000	5.955.000
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Kepulauan Talaud, Melonguane, Melonguane		30.232.800	0	0	0	30.232.800	7.095.294	0	0	0	7.095.294	(23.137.506)
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		195.247.000	0	0	0	195.247.000	255.242.000	0	0	0	255.242.000	59.995.000
5	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.961.580**	**0**	**0**	**125.961.580**	**125.961.580**
5	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	0	0	0	0	0	125.961.580	0	0	125.961.580	125.961.580
5	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**261.171.500**	**0**	**0**	**0**	**261.171.500**	**226.660.000**	**0**	**0**	**0**	**226.660.000**	**(34.511.500)**
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Kepulauan Talaud, Melonguane, Melonguane		66.191.500	0	0	0	66.191.500	46.660.000	0	0	0	46.660.000	(19.531.500)
5	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Kepulauan Talaud, Melonguane, Melonguane		9.980.000	0	0	0	9.980.000	0	0	0	0	0	(9.980.000)
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Kepulauan Talaud, Melonguane, Melonguane		185.000.000	0	0	0	185.000.000	180.000.000	0	0	0	180.000.000	(5.000.000)
5	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**37.480.800**	**0**	**0**	**0**	**37.480.800**	**62.605.000**	**0**	**0**	**0**	**62.605.000**	**25.124.200**
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Kepulauan Talaud, Melonguane, Melonguane		37.480.800	0	0	0	37.480.800	62.605.000	0	0	0	62.605.000	25.124.200
5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**				**941.036.300**	**0**	**0**	**0**	**941.036.300**	**632.633.200**	**0**	**0**	**0**	**632.633.200**	**(308.403.100)**
5	**01**	**02**	**2.01**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**				**825.564.300**	**0**	**0**	**0**	**825.564.300**	**581.419.200**	**0**	**0**	**0**	**581.419.200**	**(244.145.100)**
5	01	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			47.374.800	0	0	0	47.374.800	17.277.000	0	0	0	17.277.000	(30.097.800)
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Kepulauan Talaud, Melonguane, Melonguane		29.470.000	0	0	0	29.470.000	7.734.000	0	0	0	7.734.000	(21.736.000)
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			142.757.500	0	0	0	142.757.500	87.703.000	0	0	0	87.703.000	(55.054.500)
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			605.962.000	0	0	0	605.962.000	468.705.200	0	0	0	468.705.200	(137.256.800)
5	**01**	**02**	**2.02**		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**				**54.572.000**	**0**	**0**	**0**	**54.572.000**	**39.922.000**	**0**	**0**	**0**	**39.922.000**	**(14.650.000)**
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			54.572.000	0	0	0	54.572.000	39.922.000	0	0	0	39.922.000	(14.650.000)
5	**01**	**02**	**2.03**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**				**60.900.000**	**0**	**0**	**0**	**60.900.000**	**11.292.000**	**0**	**0**	**0**	**11.292.000**	**(49.608.000)**
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			60.900.000	0	0	0	60.900.000	11.292.000	0	0	0	11.292.000	(49.608.000)
5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**				**734.998.000**	**0**	**0**	**0**	**734.998.000**	**351.692.000**	**0**	**0**	**0**	**351.692.000**	**(383.306.000)**
5	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**				**217.500.000**	**0**	**0**	**0**	**217.500.000**	**149.258.000**	**0**	**0**	**0**	**149.258.000**	**(68.242.000)**
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		217.500.000	0	0	0	217.500.000	149.258.000	0	0	0	149.258.000	(68.242.000)
5	**01**	**03**	**2.03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**				**517.498.000**	**0**	**0**	**0**	**517.498.000**	**202.434.000**	**0**	**0**	**0**	**202.434.000**	**(315.064.000)**
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			60.000.000	0	0	0	60.000.000	29.491.000	0	0	0	29.491.000	(30.509.000)
5	01	03	2.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			166.793.000	0	0	0	166.793.000	121.078.000	0	0	0	121.078.000	(45.715.000)
5	01	03	2.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			157.500.000	0	0	0	157.500.000	48.915.000	0	0	0	48.915.000	(108.585.000)
5	01	03	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			133.205.000	0	0	0	133.205.000	2.950.000	0	0	0	2.950.000	(130.255.000)
5	**05**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**				**217.500.000**	**0**	**0**	**0**	**217.500.000**	**135.571.500**	**0**	**0**	**0**	**135.571.500**	**(81.928.500)**
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**				**217.500.000**	**0**	**0**	**0**	**217.500.000**	**135.571.500**	**0**	**0**	**0**	**135.571.500**	**(81.928.500)**
5	**05**	**02**	**2.01**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**				**50.060.000**	**0**	**0**	**0**	**50.060.000**	**34.152.000**	**0**	**0**	**0**	**34.152.000**	**(15.908.000)**
5	05	02	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50.060.000	0	0	0	50.060.000	34.152.000	0	0	0	34.152.000	(15.908.000)
5	**05**	**02**	**2.02**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**				**22.754.000**	**0**	**0**	**0**	**22.754.000**	**7.410.000**	**0**	**0**	**0**	**7.410.000**	**(15.344.000)**
5	05	02	2.02	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		22.754.000	0	0	0	22.754.000	7.410.000	0	0	0	7.410.000	(15.344.000)
5	**05**	**02**	**2.03**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**				**29.674.000**	**0**	**0**	**0**	**29.674.000**	**8.380.000**	**0**	**0**	**0**	**8.380.000**	**(21.294.000)**
5	05	02	2.03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			29.674.000	0	0	0	29.674.000	8.380.000	0	0	0	8.380.000	(21.294.000)
5	**05**	**02**	**2.04**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**				**115.012.000**	**0**	**0**	**0**	**115.012.000**	**85.629.500**	**0**	**0**	**0**	**85.629.500**	**(29.382.500)**
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		115.012.000	0	0	0	115.012.000	85.629.500	0	0	0	85.629.500	(29.382.500)
Total																			6.027.754.766

B. Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Talaud

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan urnum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil *(result oriented government)*. Orientasi pada *input*, terutama uang, seperti selama ini dijalankan, hendak ditinggalkan. Pernerintahan yang berorientasi pada hasil pertarna-tarna akan fokus pada permasalahan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilakn *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan rnasyarakat. *Output* rnerupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pernerintah dan dapat berwujud sarana, barang, dan jasa pelayanan kepada rnasyarakat, sedang *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. *Output* dan *outcome* inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja, bukan kernarnpuan menyerap anggaran seperti persepsi yang ada selarna ini.

Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Talaud adalah sebagai berikut:

Tabel 8

Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Talaud

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Keterangan	Penanggungjawab
1.	Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah	Nilai SAKIP	Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah Yang Mencapai Target Kinerjanya Dengan Baik	∑Pd Yang Mencapai Target Kinerjanya Dengan Baik X 100 ∑Total PD	Bidang P2EPDA
				Persentase Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Σ PD Yg Nilai SAKIP Kategori Baik X 100 ∑TotaL PD	Bidang P2M Bidang Perekonomian, Sda,Infrastruktur dan Kewilayahan
			Meningkatkan Kualitas Hasil	Persentase Hasil Penelitian Yang	Σ Hasil Penerlitian Yg Direkomendasikan Dalam Pelaksanaan Pembangunan X 100	Bidang Litbang

			Kelitbangan Dan Inovasi Untuk Pengembangan Daerah	Direkomendasikan Dalam Pelaksanaan Pembangunan	Σ Total Penerlitian	
				Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	Σ PD Yg Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah X 100 Σ Total PD	Bidang Litbang
				Persentase Kebijakan Inovasi Yang Diterapkan Di Daerah	Σ Kebijakan Inovasi Yg Diterapkan di Daerah X 100 Σ Total Inovasi	Bidang Litbang

Tabel 9

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tahun 2020 – 2025

Sasaran Strategis PD	Indikator	Target Sasaran/ Tujuan Kinerja Tahun Ke		Sasaran Strategis Program	Indikator	Target Sasaran/ Tujuan Kinerja Tahun Ke		Progran dan Kegiatan		
		Kondisi Awal	2022			Kondisi Awal	2022			
Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah Yang Mencapai Target Kinerjanya Dengan Baik	75% - 80%	80% - 85%	Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian Dan Evaliasi Pembangunan Yang Menjawab Isu Strategis Daerah	Persentase Keterkaitan Dan Keselarasan Antara Dokumen RPJMD Dengan RKPD	100%	100%	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
					Persentase Keterkaitan Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah Dengan Sasaran Dan Prioritas Nasional	100%	100%			Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
					Persentase Konsistensi antara prioritas pembangunan daerah dengan program prioritas daerah.	100%	100%			
					Persentase Konsistensi Antara Prioritas Pembangunan Dengan Pagu Anggaran	87,50%	90,00%			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
					Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Dan Penganggaran	75,00%	80,00%			
					Persentase Keterkaitan Antara Hasil Evaluasi Perencanaan Tahun Sebelumnya Dengan Isu Strategis Tahun Perencanaan	90%	95%			Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah

				Persentase Ketersediaan database pembangunan dari semua bidang	60%	70%		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
								Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusuan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Nilai Sakip Perangkat Daerah	75% - 80%	80% - 85%	Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah di semua bidang	Persentase keselarasan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD	50%	100%	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumene Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
									Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
									Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
									Koordinasi Penyusunan Dokumene Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
									Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
									Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
				Persentase keselarasan Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	70%	80%		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
									Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

							Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
							Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam
							Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam
							Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam
						Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
							Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
							Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
							Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
							Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
							Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah

										Bidang Kewilayahan
Meningkatkan Kualitas Hasil Kelitbangan Dan Inovasi Untuk Pengembangan Daerah	Prosentase Hasil Penelitian Yang Direkomendasikan Dalam Pelaksanaan Pembangunan	60-65%	65-70%	Meningkatkan hasil penelitian dan pengembangan daerah	Prosentase Peningkatan Jumlah Kajian Penelitian Dan Pengembangan Daerah Yang Melibatkan Perangkat Daerah, Lembaga Penelitian, Pihak Swasta Dan Elemen Masyarakat	0%	50%	Penelitian dan Pengembangan Wilayah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelengaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi Pelaksanaan Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
										Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
									Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Peneliian dan Pengembangan Pariwisata
									Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
	Prosentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	3,4%	10%	Terbangunnya Budaya Inovasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah Dengan Kualitas Inovasi Terkait Isu Strategis Pemerintah	50-55%	55-60%		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
	Prosentase Kebijakan Inovasi Yang Diterapkan di Daerah	50-55%	55-60%		Peningkatan Jumlah Usulan Inovasi Dari Perangkat Daerah	0%	50,00%			
				Meningkatkan kualitas Perencanaan kinerja, dan keuangan OPD	Jumlah kegiatan OPD yang target kinerjanja tercapai dengan baik	95%	12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, Kinerja Perangkat Daerah dan Evaluasi	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
					Jumlah dokumen akuntabilitas dan kinerja	100%	4		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
				Meningkatkan kualitas kualitas tindak lanjut dan rekomendasi terkait saran dan perbaikan bidang pelayanan publik dan perencaaan	Jumlah dokumen perencanaan yang dilakukan penyesuaian tepat waktu	80%	6		Perencanaan, Penganggaran, Kinerja Perangkat Daerah dan Evaluasi	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Meningkatkan kualitas pelayanan internal Dinas	Jumlah PNS OPD yang kebutuhan hak-haknya terpenuhi tepat waktu	60%	33		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
				Sasaran Strategis Kegiatan	**Indikator**	**Target Sasaran/ Tujuan Kinerja Tahun Ke**		**Program**	**Kegiatan**	**Sub Kegiatan**
						Kondisi Awal	**2022**			
				Meningkatkan koordinasi dan kerjasama	Persentase Hasil Koordinasi yang dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen	90%	95%	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen

dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	perencanaan			Pembangunan Daerah		Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
						Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
Meningkatkan kesadaran dan partisipasi seluruh elemen dan stakeholder dalam perencanaan dan pembangunan daerah	Persentase Persentase Pokok-Pokok Pikran DPRD Yang Diakomodir Dalam Dokumen Perencanaan	50%	55%		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
	Persentase Usulan Masyarakat Yang Diakomodir Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	60%	70%			
Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah Teknis, Kecamatan, Desa dan kelurahan dalam penyusunan database pembangunan	Persentase Perangkat Daerah Teknis yang memiilki database lengkap	40%	60%		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusuan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
	Persentase Kecamatan, Desa dan Kelurahan yang memiliki database yang lengkap	75%	90%			
Meningkatkan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Monitoring atas pelaksanaan pembangunan daerah	70%	85%		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusuan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
	Persentase Perangkat Daerah yang melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaannya	90%	100%			
Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Renstra Perangkat Daerah berkualitas baik	40% - 50%	80 - 100%	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumene Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah

						Bidang Pemerintahan
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
						Koordinasi Penyusunan Dokumene Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
		Persentase Renja Perangkat Daerah berkualitas baik	75% - 80%	80 - 85%	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen

							Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam
		% Perangkat Daerah yang mampu menjabarkan target kinerjanya hingga jenjang individu	75% - 80%	80 - 85%		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
							Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
							Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
							Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
							Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
							Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
	Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dalam penelitian dan pengembangan daerah	Persentase Perangkat Daerah yang terlibat dalam penelitian dan pengembangan daerah	3%	6%	Penelitian dan Pengembangan Wilayah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelengaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi Pelaksanaan Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
							Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
		Persentase/Jumlah Lembaga Penelitian, Perguruan Tinggi (akademisi), Pihak Swasta dan Elemen Masyarakat yang bekerjasama dalam penelitian dan pengembangan daerah	1	2		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Peneliian dan Pengembangan Pariwisata
						Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembanguna	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan

						n	
	Meningkatkan Minat Seluruh Perangkat Daerah Dalam Menciptakan Inovasi Yang Mampu Menjawab Isu Strategis Urusannya	Persentase Peranngkat Paritisipasi Perangkat Daerah Dalam Membuat Inovasi Daerah	6-7%	9-10%		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
	Meningkatkan kualitas pelayanan bidang keuangan dinas	Jumlah dokumen bidang keuangan yang disusun/diselesaikan tepat waktu	95%	12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
	Meningkatkan kualitas tindak lanjut dan rekomendasi terkait saran dan perbaikan pengelolaan keuangan	Jumlah dokumen keuangan yang dilakukan penyesuaian tepat waktu	100%	4		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
	Meningkatnya kualitas SDM pengelola program dan kegiatan internal dinas	Jumlah PNS yang mendapatkan pelatihan sesuai kebutuhan dan kompetensi serta Bimbingan Teknis	80%	2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
	Meningkatkan kualitas pelayanan Kepegawaian	Jumlah PNS yang kebutuhan dokumen telah diajukan tepat waktu	95%	33		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
		Pangkat berkala	0%	3		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
	Meningkatkan kualitas pemeliharaan sarana prasarana internal dinas	Prosentase aset bergerak/tidak bergerak dinas yang terpelihara dengan baik	95%	15%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Meningkatkan kualitas pelayanan bidang perencanaan program	Jumlah dokumen perencanaan disusun/diselesaikan tepat waktu	0%	6		Perencanaan, Penganggaran, Kinerja Perangkat Daerah dan Evaluasi	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Meningkatkan kualitas tindak lanjut dan rekomendasi terkait saran dan perbaikan bidang perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan dilakukan penyesuaian tepat waktu	0%	4		Perencanaan, Penganggaran, Kinerja Perangkat Daerah dan Evaluasi	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

C. Realisasi Anggaran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

Tabel 10

Realisasi Anggaran Tahun 2022

URAIAN	PAGU PERUBAHAN (SIPD)	REALISASI TAHUN 2022		SISA ANGGARAN
		FISIK KEUANGAN	%	
1	2	3	4	5
	4.887.706.500	**4.742.197.761**	**97,02**	**145.508.739**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/KOTA	**3.767.809.800**	**3.740.890.748**	**99,29**	**26.919.052**
BELANJA OPERASI	**2.979.984.426**	**2.960.416.070**	**99,34**	**19.568.356**
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**2.979.984.426**	**2.960.416.070**	**99,34**	**19.568.356**
Belanja Gaji & Tunjangan	**2.158.484.426**	**2.146.616.182**	**99,45**	**11.868.244**
Gaji Pokok	1.589.414.722	1.581.039.474	**99,47**	**8.375.248**
Tunjangan Keluarga	143.234.252	142.348.048	**99,38**	**886.204**
Tunjangan Jabatan	210.490.000	209.410.000	**99,49**	**1.080.000**
Tunjangan Fungsional Umum	36.198.008	35.880.000	**99,12**	**318.008**
Tunjangan Beras	95.747.932	95.232.300	**99,46**	**515.632**
PPh	2.556.092	2.489.857	**97,41**	**66.235**
Pembulatan Gaji	26.250	25.940	**98,82**	**310**
Iuran Jaminan Kesehatan	67.752.090	67.226.092	**99,22**	**525.998**
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	3.266.340	3.241.121	**99,23**	**25.219**
Iuran Jaminan Kematian	9.798.740	9.723.350	**99,23**	**75.390**
Tambahan Penghasilan PNS	**821.500.000**	**813.799.888**	**99,06**	**7.700.112**
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	821.500.000	813.799.888	**99,06**	**7.700.112**
BELANJA BARANG DAN JASA	**1.907.722.074**	**1.781.781.691**	**93,40**	**125.940.383**
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**17.141.500**	**17.141.500**	**100,00**	**-**
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**9.235.000**	**9.235.000**	**100,00**	**-**
Belanja Cetak	2.000.000	2.000.000	**100,00**	**-**
Belanja Makanan dan Minuman	7.235.000	7.235.000	**100,00**	**-**
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	**7.906.500**	**7.906.500**	**100,00**	**-**
Belanja Alat Tulis Kantor	2.014.000	2.014.000	**100,00**	**-**
Belanja Makanan dan Minuman	5.892.500	5.892.500	**100,00**	**-**
Adminsitrasi Umum Perangkat Daerah	**355.457.294**	**349.710.778**	**98,38**	**5.746.516**
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	**6.019.000**	**6.019.000**	**100,00**	**-**
Belanja Alat Listrik	6.019.000	**6.019.000**	**100,00**	**-**
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**47.521.000**	**47.451.750**	**99,85**	**69.250**
Belanja Alat Tulis Kantor	11.905.000	11.896.750	**99,93**	**8.250**
Belanja Kertas dan Cover	8.270.000	8.245.000	**99,70**	**25.000**
Belanja Bahan Cetak	10.005.000	9.985.000	**99,80**	**20.000**
Belanja Benda Pos	3.375.000	3.375.000	**100,00**	**-**
Belanja Perabot Kantor	10.828.000	10.825.000	**99,97**	**3.000**

Belanja Kegiatan Kantor Lainnya	3.138.000	3.125.000	99,59	13.000
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	**39.580.000**	**33.950.000**	**85,78**	**5.630.000**
Belanja Makanan Minuman Rapat	19.380.000	13.757.500	70,99	5.622.500
Belanja Makanan Minuman Jamuan Tamu	20.200.000	20.192.500	99,96	7.500
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	**7.095.294**	**7.095.200**	**100,00**	**94**
Belanja Bahan Cetak	7.095.294	7.095.200	100,00	94
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**255.242.000**	**255.194.828**	**99,98**	**47.172**
Belanja Alat Tulis Kantor	200.000	200.000	100,00	-
Belanja Kertas dan Cover	520.000	520.000	100,00	-
Belanja Bahan Cetak	1.575.000	1.575.000	100,00	-
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	168.712.000	168.670.828	99,98	41.172
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	84.235.000	84.229.000	99,99	6.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**125.961.580**	**125.952.000**	**99,99**	**9.580**
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	125.961.580	125.952.000	99,99	9.580
Belanja Modal Personal Komputer	125.961.580	125.952.000	99,99	9.580
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**226.660.000**	**225.507.000**	**99,49**	**1.153.000**
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**46.660.000**	**45.507.000**	**97,53**	**1.153.000**
Belanja Tagihan Air	16.500.000	15.700.000	95,15	800.000
Belanja Tagihan Listrik	30.160.000	29.807.000	98,83	353.000
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	**180.000.000**	**180.000.000**	**100,00**	**-**
Belanja Tenaga Kebersihan	105.000.000	105.000.000	100,00	-
Belanja Tenaga Keamanan	48.000.000	48.000.000	100,00	-
Belanja Tenaga Sopir	27.000.000	27.000.000	100,00	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**62.605.000**	**62.163.400**	**99,29**	**441.600**
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	**62.605.000**	**62.163.400**	**99,29**	**441.600**
Belanja Bahan Bakar	33.559.600	33.127.000	98,71	432.600
Belanja Pembayaran Pajak	2.601.400	2.601.400	100,00	-
Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas	26.444.000	26.435.000	99,97	9.000
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DANEVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	**632.633.200**	**524.436.386**	**82,90**	**108.196.814**
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	**581.419.200**	**473.265.766**	**81,40**	**108.153.434**
- Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	**17.277.000**	**17.277.000**	**100,00**	**-**
Belanja Alat Tulis Kantor	1.497.000	1.497.000	100,00	-
Belanja Kertas dan Cover	1.445.000	1.445.000	100,00	-
Belanja Bahan Cetak	2.835.000	2.835.000	100,00	-
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.500.000	11.500.000	100,00	-
- Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	**7.734.000**	**7.734.000**	**100,00**	**-**
Belanja Alat Tulis Kantor	2.459.000	2.459.000	100,00	-
Belanja Kertas dan Cover	2.440.000	2.440.000	100,00	-
Belanja Bahan Cetak	2.835.000	2.835.000	100,00	-
- Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	**87.703.000**	**81.748.000**	**93,21**	**5.955.000**

Belanja Alat Tulis Kantor	3.438.000	3.438.000	100,00	-
Belanja Kertas dan Cover	4.525.000	3.520.000	77,79	1.005.000
Belanja Bahan Cetak	12.000.000	7.050.000	58,75	4.950.000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26.625.000	26.625.000	100,00	-
Honorarium Narasumber/Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Panitia	14.000.000	14.000.000	100,00	-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	27.115.000	27.115.000	100,00	-
- Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kab/Kota	**468.705.200**	**366.506.766**	**78,20**	**102.198.434**
Belanja Alat Tulis Kantor	29.145.000	21.625.000	74,20	7.520.000
Belanja Kertas dan Cover	28.635.000	18.935.000	66,13	9.700.000
Belanja Bahan Cetak	37.156.000	26.570.500	71,51	10.585.500
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	65.024.000	59.377.500	91,32	5.646.500
Honorarium Narasumber/Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Panitia	105.800.000	52.500.000	49,62	53.300.000
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	202.945.200	187.498.766	92,39	15.446.434
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**39.922.000**	**39.917.620**	**99,99**	**4.380**
- Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembagunan Daerah	**39.922.000**	**39.917.620**	**99,99**	**4.380**
Belanja Alat Tulis Kantor	1.247.000	1.247.000	100,00	-
Belanja Kertas dan Cover	2.915.000	2.915.000	100,00	-
Belanja Bahan Cetak	1.680.000	1.680.000	100,00	-
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.840.000	7.840.000	100,00	-
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26.240.000	26.235.620	99,98	4.380
Pengendalian, Evaluasi Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**11.292.000**	**11.253.000**	**99,65**	**39.000**
- Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	**11.292.000**	**11.253.000**	**99,65**	**39.000**
Belanja Alat Tulis Kantor	1.255.000	1.255.000	100,00	-
Belanja Kertas dan Cover	4.037.000	4.030.000	99,83	7.000
Belanja Bahan Cetak	6.000.000	5.968.000	99,47	32.000
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASIPERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	**351.692.000**	**341.327.400**	**97,05**	**10.364.600**
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia	**149.258.000**	**140.304.900**	**94,00**	**8.953.100**
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	**149.258.000**	**140.304.900**	**94,00**	**8.953.100**
Belanja Alat Tulis Kantor	8.632.000	8.624.000	99,91	8.000
Belanja Kertas dan Cover	5.925.000	5.570.000	94,01	355.000
Belanja Bahan Cetak	8.515.000	8.505.000	99,88	10.000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.925.000	28.457.500	95,10	1.467.500
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31.816.000	25.628.400	80,55	6.187.600
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	64.445.000	63.520.000	98,56	925.000
Koordinasi Perencanaan Bidang Insfrastruktur dan Kewilayahan	**202.434.000**	**201.022.500**	**99,30**	**1.411.500**
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Insfrastruktur	**29.491.000**	**29.491.000**	**100,00**	**-**

Belanja Alat Tulis Kantor	1.620.000	1.620.000	100,00	-
Belanja Kertas dan Cover	2.000.000	2.000.000	100,00	-
Belanja Bahan Cetak	1.985.000	1.985.000	100,00	-
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	23.886.000	23.886.000	100,00	-
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	**121.078.000**	**119.666.500**	**98,83**	**1.411.500**
Belanja Alat Tulis Kantor	1.645.000	1.645.000	100,00	-
Belanja Kertas dan Cover	975.000	975.000	100,00	-
Belanja Jasa Konsultasi/ Tenaga Ahli	99.525.000	99.511.500	99,99	13.500
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.458.000	6.060.000	81,26	1.398.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.475.000	11.475.000	100,00	-
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	**48.915.000**	**48.915.000**	**100,00**	**-**
Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000	3.000.000	100,00	-
Belanja Kertas dan Cover	2.500.000	2.500.000	100,00	-
Belanja Bahan Cetak	3.475.000	3.475.000	100,00	-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	39.940.000	39.940.000	100,00	-
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	**2.950.000**	**2.950.000**	**100,00**	**-**
Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000	1.000.000	100,00	-
Belanja Kertas dan Cover	450.000	450.000	100,00	-
Belanja Bahan Cetak	1.500.000	1.500.000	100,00	-
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGANDAERAH	**135.571.500**	**135.543.227**	**99,98**	**28.273**
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	**34.152.000**	**34.152.000**	**100,00**	**-**
- Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	**34.152.000**	**34.152.000**	**100,00**	**-**
Belanja Alat Tulis Kantor	1.535.000	1.535.000	100,00	-
Belanja Kertas dan Cover	1.140.000	1.140.000	100,00	-
Belanja Bahan Cetak	2.062.000	2.062.000	100,00	-
Belanja Benda Pos	735.000	735.000	100,00	-
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.220.000	9.220.000	100,00	-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19.460.000	19.460.000	100,00	-
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	**7.410.000**	**7.410.000**	**100,00**	**-**
Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	**7.410.000**	**7.410.000**	**100,00**	**-**
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.410.000	7.410.000	100,00	-
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	**8.380.000**	**8.380.000**	**100,00**	**-**
- Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	**8.380.000**	**8.380.000**	**100,00**	**-**
Belanja Alat Tulis Kantor	800.000	800.000	100,00	-
Belanja Kertas dan Cover	1.580.000	1.580.000	100,00	-
Belanja Bahan Cetak	1.690.000	1.690.000	100,00	-
Belanja Benda Pos	1.350.000	1.350.000	100,00	-
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.960.000	2.960.000	100,00	-

Pengembangan Inovasi dan Teknologi	**85.629.500**	**85.601.227**	**99,97**	**28.273**
- Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	**85.629.500**	**85.601.227**	**99,97**	**28.273**
Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000	1.000.000	**100,00**	**-**
Belanja Kertas dan Cover	1.719.500	1.710.000	**99,45**	**9.500**
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.725.000	9.715.000	**99,90**	**10.000**
Honorarium Narasumber/Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Panitia	9.100.000	9.100.000	**100,00**	**-**
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	30.265.000	30.256.227	**99,97**	**8.773**
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	33.820.000	33.820.000	**100,00**	**-**
TOTAL	**4.887.706.500**	**4.742.197.761**	**97,02**	**145.508.739,00**

D. Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Tahun Anggaran 2022.

Capaian kinerja organisasi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang dilaksanakan tahun 2022 terhadap 2 sasaran strategi dan dengan 5 Indikator Kinerja Utama.

Realisasi Anggaran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Tahun Anggaran 2022 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.4.887.706.500,- merealisasikan belanja yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp.2.960.416.070,- Belanja Barang dan Jasa Rp.1.637.093.691,-, Belanja Modal Rp.125.952.000,- dengan total Rp.4.742.197.761,-. atau capaian realisasi keuangan sebesar 97,02%.

Tabel 13

Realisasi Anggaran Tahun 2022

No.	Uraian	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	Jumlah
1	Januari	294.074.940	-	-	294.074.940
2	Februari	162.443.791	92.085.400	-	254.529.191
3	Maret	162.712.192	130.375.750	-	293.087.942
4	April	318.279.330	75.771.400	-	394.050.730
5	Mei	544.058.794	194.384.427	-	738.443.221
6	Juni	210.115.688	212.506.496	-	422.622.184
7	Juli	361.168.005	206.447.100	-	567.615.105
8	Agustus	199.452.231	137.471.358	-	336.923.589
9	September	199.047.033	101.597.600	-	300.644.633
10	Oktober	55.271.000	164.760.520	-	220.031.520
11	Nopember	344.025.066	151.631.440	-	495.656.506
12	Desember	109.768.000	188.798.200	125.952.000	424.518.200
	Total	**2.960.416.070**	**1.655.829.691**	**125.952.000**	**4.742.197.761**

Grafik 1. Peningkatan Realisasi Belanja

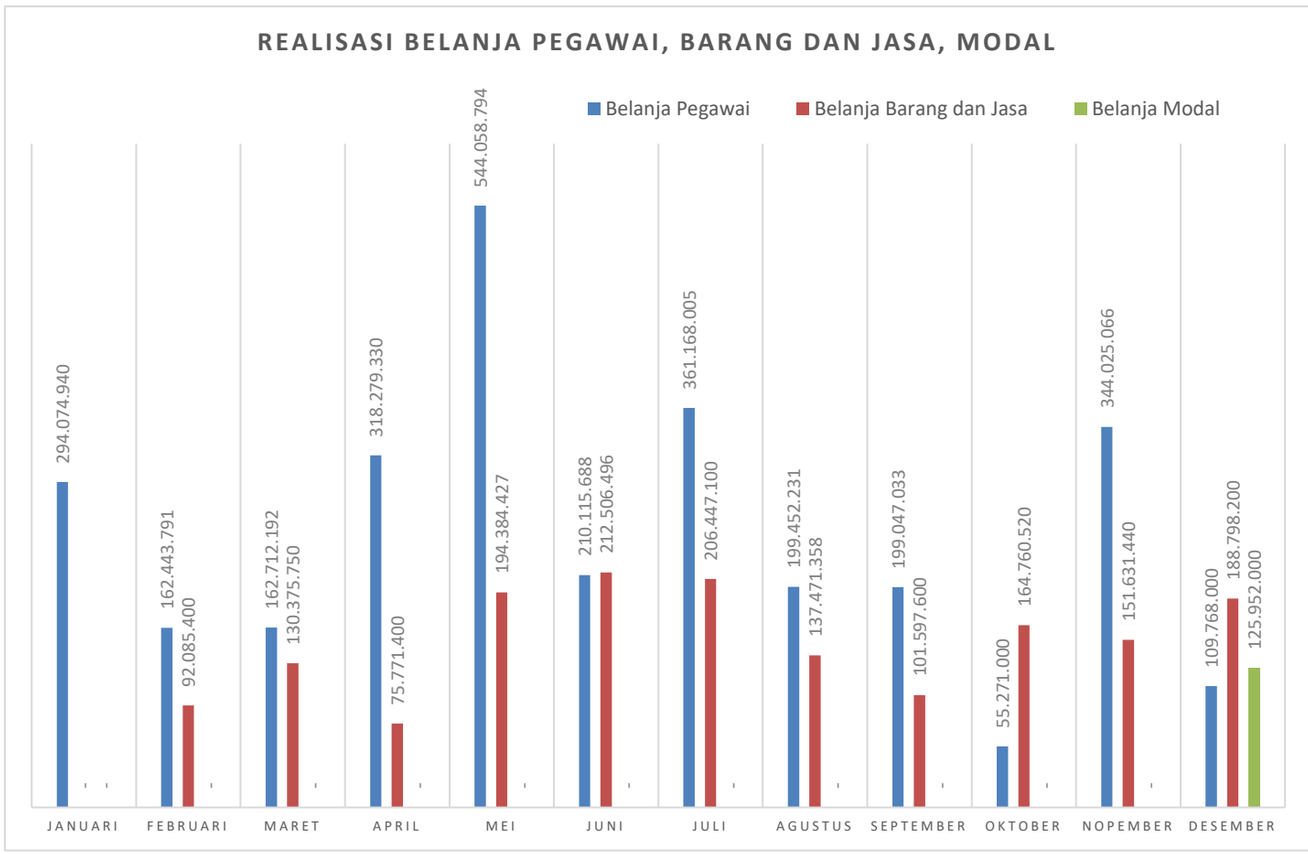

BAB V

CAPAIAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

TAHUN ANGGARAN 2022

A. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan BAPELITBANG

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Perencanaan Penelitian dan Pengembangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

  Sasaran Strategi tersebut diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran sebagaimana pada tabel berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	WAKTU	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	SOLUSI
Sasaran OPD 1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	1	Persentse Perangkat Daerah yang mencapai target kinerja dengan baik	Persen	80% - 85%	84,00	12 Bulan	98,82%	-	-
	2	Persentase Perangkat Daerah yang capaian SAKIP pada Komponen Perencanaan Kinerja Minimal Baik	Persen	80% - 85%	84,50	12 Bulan	99,41%	-	-

  Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan dengan merealisasikan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

- Meningkatkan kualitas hasil kelitbangan dan inovasi untuk pengembangan daerah.

  Sasaran Strategi tersebut diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran sebagaimana pada tabel berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	WAKTU	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	SOLUSI
Sasaran OPD 2. Meningkatkan Kualitas Hasil Kelitbangan dan Inovasi untuk Pengembangan Daerah	1	Persentase Hasil penelitian yang direkomendasikan dalam pelaksanaan pembangunan	Persen	65%-70%	-	12 Bulan	0%	Tidak tersedianya anggaran untuk mendukung pencapaian target kinerja	Perlu dukungan aggaran
	2	Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	OPD	2 OPD	4	12 Bulan	200%	Kurangnya kreativitas dari OPD terhadap inovasi daerah	Perlu dilakukan sosialisasi tentang pentingnya inovasi daerah
	3	Persentase Kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	Persen	55%-60 %	45	12 Bulan	75,00%	Belum menjadi prioritas daerah dalam kebijakan fiskal	Harus menjadi priorits dalam mendukung kebijkan pembangunan daerah

  Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan dengan merealisasikan Program Penelitian dan Pengembangan Wilayah.

- Untuk merealisasikan Sasaran Strategi Perangkat Daerah ditunjang oleh Sasaran Strategis Program dan Kegiatan sebagai berikut :
  1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan yang menjawab isu strategis daerah.

     Sasaran Strategi tersebut diukur dengan 7 (tuju) indikator kinerja sasaran sebagaimana pada tabel berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	WAKTU	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	SOLUSI
Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan yang menjawab isu strategis daerah	1	Persentase keterkaitan dan keselarasan antara dokumen RPJMD dan RKPD	Persen	100%	100%	12 Bulan	100%	-	Ket: dokumen RKPD disusun dengan mengacu pada dokumen RPJMD sehingga program, kegiatan, dan sub kegiatan yang ada pada RKPD sudah selaras dengan dokumen RPJMD
	2	Persentase Keterkaitan sasaran dan prioritas pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas Nasional	Persen	100%	100%	12 Bulan	100%	-	Ket: Dokumen RKPD Kab. Kepl. Talaud disusun dengan mengacu pada RKP dan RKPD Provinsi sehingga prioritas Kab. Kepl. Talaud selaras dengan prioritas Nasional
	3	Persentase Konsisten antara prioritas pembangunan daerah dengan program prioritas daerah	Persen	100%	100%	12 Bulan	100%	-	-
	4	Persentase Konsistensi antara Prioritas Pembangunan Dengan Pagu Anggaran	Persen	90%	85%	12 Bulan	94%	-	-
	5	Persentase Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran	Persen	80%	100%	12 Bulan	100%	-	Ket: Pemerintah Pusat sudah mengharuskan Pemda untuk menggunakan aplikasi SIPD dalam menyusun Perencaan dan Penganggaran sehingga konsistensi program kegiatan dan sub kegiatan pada perencanaan dengan penganggaran bisa dicapai 100%
	6	Persentase Ketersediaan database pembangunan dari semua bidang	Persen	95%	86%	12 Bulan	91%	Ada beberapa data dari bidang-bidang yang belum tersedia dan terupdate sampai tahun 2021	Mengoptimalkan kegiatan-kegiatan pendataan sektoral bidang terupdate, tervalidasi dan berkelanjutan di Pemerintah Kab. Kepl. Talaud

	7	Persentase Keterkaitan antara hasil evaluasi perencanaan tahun sebelumnya dengan isu strategis tahun perencanaan	Persen	70%	75%	12 Bulan	100%	-	-

Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan dengan merealisasikan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah serta Meningkatkan kesadaran dan partisipasi seluruh elemen dan stakeholder dalam perencanaan dan pembangunan daerah.

  Sasaran Strategi tersebut diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran sebagaimana pada tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	WAKTU	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	SOLUSI
Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	1	Persentase Hasil Koordinasi yang dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen perencanaan	Persen	95%	95%	12 Bulan	100%	-	-
Meningkatkan kesadaran dan partisipasi seluruh elemen dan stakeholder dalam perencanaan dan pembangunan daerah	2	Persentase Persentase Pokok-Pokok Pikran DPRD Yang Diakomodir Dalam Dokumen Perencanaan	Persen	55%	70%	12 Bulan	100%	-	Ket: pokir DPRD yang masuk dalam dokumen perencanaan harus terlebih dahulu diusulkan lewat aplikasi SIPD dan divalidasi oleh Bapelitbang sebelum diteruskan ke Dinas/Badan teknis, sehingga pokir DPRD bisa diakomodir dengan baik.
	3	Persentase Usulan Masyarakat Yang Diakomodir Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	70%	65%	12 Bulan	92,8%	-Keterbatasan Anggaran yang tersedia. - Belum menjadi prioritas dari pembangunan daerah	pemerintah daerah terus berusaha melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat agar usulan dari masyarakat bisa diakomodir dengan dana APBN

Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan dengan merealisasikan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Abupaten/Kota.

- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah Teknis, Kecamatan, Desa dan kelurahan dalam penyusunan database pembangunan.

  Sasaran Strategi tersebut diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran sebagaimana pada tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	WAKTU	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	SOLUSI
Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah Teknis, Kecamatan, Desa dan kelurahan dalam penyusunan database pembangunan	1	Persentase Perangkat Daerah Teknis yang memiilki database lengkap	Persen	60%	58%	12 Bulan	97%	-. Beberapa OPD yang belum terupdated data-data sektoral karena ketersediaan dana	-. Mengoptimalkan fungsi dan peran OPD dalam ketersediaan database sektoral di OPD
								-. Belum adanya sistem data yang terintegrasi	-. Perlu adanya Sistem Data yang terintegrasi dalam sistem Pemerintahan Daerah Kab. Kepl. Talaud
									-. Perlu dukungan dana dalam penyelenggaran kegiatan optimalisasi pengelolaan data sektoral OPD
	2	Persentase Kecamatan, Desa dan Kelurahan yang memiliki database yang lengkap	Persen	90%	80%	12 Bulan	89%	Masih belum terkelola data-data primer dan sekunder dari desa dan kelurahan	Mempercepat pengelolaan data-data dari Desa dan pengelolaan data Kelurahan untuk pembuatan data base tingkat Kecamatan, Desa maupun Kelurahan
									Menyediakan dana untuk program /kegiatan yang mendukung pengeloaan data-data baik ditingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan
									Mengoptimalakan SDM/ ASN dalam pengelolaan data di Tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa

Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan dengan merealisasikan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

- Meningkatkan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.

  Sasaran Strategi tersebut diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran sebagaimana pada tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	WAKTU	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	SOLUSI
Meningkatkan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah	1	Persentase Monitoring atas pelaksanaan pembangunan daerah	Persen	85%	80%	12 Bulan	94,1%	Tidak semua lokasi kegiatan pembangunan daerah dapat dimonitoring dikarenakan keterbatasan anggaran	Mamanfaatkan media digital untuk komunikasi dalam pengiriman update pelaksanaan pembangunan
	2	Persentase Perangkat Daerah yang melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaannya	Persen	100%	100%	12 Bulan	100%	-	-

Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan dengan merealisasikan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

- Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah di semua bidang.

Sasaran Strategi tersebut diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran sebagaimana pada tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	WAKTU	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	SOLUSI
Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah di semua bidang	1	Persentase keselarasan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD	Persen	100%	75%	12 Bulan	75%	Perubahan RPJMD belum ditetapkan, sehingga untuk verifikasi Ranhir RPJMD belum dapat dilaksanakan	Percepatan penetapan Perubahan RPJMD
	2	Persentase keselarasan Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	Persen	80%	80%	12 Bulan	100%	Belum semua Perangkat Daerah menyusun Renstra sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017	Perlunya bimtek perencanaan di semua Perangkat Daerah

Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan dengan merealisasikan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

- Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan Perangkat Daerah di Bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia Wilayah I.

  Sasaran Strategi tersebut diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran sebagaimana pada tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	WAKTU	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	SOLUSI
Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan Perangkat Daerah di Bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia Wilayah I	1	Persentase Renstra Perangkat Daerah berkualitas baik	Persen	80%-100%	75%	12 Bulan	94%	Belum semua Perangkat Daerah menyusun Renstra sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017	Perlunya bimtek perencanaan di semua Perangkat Daerah
	2	Persentase Renja Perangkat Daerah berkualitas baik	Persen	80%-85%	75%	12 Bulan	94%	Belum semua Perangkat Daerah menyusun Renja sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017	Perlunya bimtek perencanaan di semua Perangkat Daerah
	3	Persentase Perangkat Daerah yang mampu menjabarkan target kinerjanya hingga jenjang individu	Persen	80%-85%	75%	12 Bulan	94%	tidak semua target kinerja Perangkat Daerah terlaksana karena keterbatasan anggaran	semestinya pada proses perencanaan money follow program, sehingga kinerja untuk mencapai visi dan misi kepala daerah dapat tercapai targetnya

Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan dengan merealisasikan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

- Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan Perangkat Daerah di Bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia Wilayah II.

  Sasaran Strategi tersebut diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran sebagaimana pada tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	WAKTU	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	SOLUSI
Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan Perangkat Daerah di Bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia Wilayah II	1	Persentase Renstra Perangkat Daerah berkualitas baik	Persen	80%-100%	75%	12 Bulan	94%	rendahnya ketaatan Perangkat Daerah untuk melakukan verifikasi Renstra PD di Bapelitbang	Perlunya kesadaran PD untuk melakukan verifikasi Renstra PD di Bapelitbang
	2	Persentase Renja Perangkat Daerah berkualitas baik	Persen	80%-85%	75%	12 Bulan	94%	rendahnya ketaatan Perangkat Daerah untuk melakukan verifikasi Renstra PD di Bapelitbang	Perlunya kesadaran PD untuk melakukan verifikasi Renstra PD di Bapelitbang
	3	Persentase Perangkat Daerah yang mampu menjabarkan target kinerjanya hingga jenjang individu	Persen	80%-85%	75%	12 Bulan	94%	tidak semua target kinerja Perangkat Daerah terlaksana karena keterbatasan anggaran	semestinya pada proses perencanaan money follow program, sehingga kinerja untuk mencapai visi dan misi kepala daerah dapat tercapai targetnya

Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan dengan merealisasikan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

- Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan Perangkat Daerah di Bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia Wilayah III.

  Sasaran Strategi tersebut diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran sebagaimana pada tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	WAKTU	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	SOLUSI
Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan Perangkat Daerah di Bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia Wilayah III	1	Persentase Renstra Perangkat Daerah berkualitas baik	Persen	80%-100%	75%	12 Bulan	94%	rendahnya ketaatan Perangkat Daerah untuk melakukan verifikasi Renstra PD di Bapelitbang	Perlunya kesadaran PD untuk melakukan verifikasi Renstra PD di Bapelitbang
	2	Persentase Renja Perangkat Daerah berkualitas baik	Persen	80%-85%	75%	12 Bulan	94%	rendahnya ketaatan Perangkat Daerah untuk melakukan verifikasi Renstra PD di Bapelitbang	Perlunya kesadaran PD untuk melakukan verifikasi Renstra PD di Bapelitbang
	3	Persentase Perangkat Daerah yang mampu menjabarkan target kinerjanya hingga jenjang individu	Persen	80%-85%	75%	12 Bulan	94%	tidak semua target kinerja Perangkat Daerah terlaksana karena keterbatasan anggaran	semestinya pada proses perencanaan money follow program, sehingga kinerja untuk mencapai visi dan misi kepala daerah dapat tercapai targetnya

Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan dengan merealisasikan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

- Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah di semua bidang.

  Sasaran Strategi tersebut diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran sebagaimana pada tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	WAKTU	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	SOLUSI
Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah di semua bidang	1	Persentase keselarasan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD	Persen	100%	75%	12 Bulan	75%	-	Percepatan penetapan Perubahan RPJMD
	2	Persentase keselarasan Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	Persen	80%-85%	82,50%	12 Bulan	97%	RENJA Kecamatan masih perlu perbaikan dan perlu sosialisasi tentang Tata Cara Penyusunan	Mendampingi Penyusunan RENJA Kecamatan lebih intensif dan menyediakan SDM serta Anggaran yang memadai di Kecamatan

Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan dengan merealisasikan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

- Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan Perangkat Daerah di Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan I.

  Sasaran Strategi tersebut diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran sebagaimana pada tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	WAKTU	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	SOLUSI
Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan Perangkat Daerah di Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan I	1	Persentase Renstra Perangkat Daerah berkualitas baik	Persen	80%-100%	75%	12 Bulan	75%	Perubahan RPJMD belum ditetapkan, sehingga untuk Verifikasi Ranhir RPJMD belum dapat	Percepatan Penetapan Perubahan RPJMD
	2	Persentase Renja Perangkat Daerah berkualitas baik	Persen	80%-85%	82,50%	12 Bulan	97%	RENJA Kecamatan masih perlu perbaikan dan perlu sosialisasi tentang Tata Cara Penyusunan	Mendampingi Penyusunan RENJA Kecamatan lebih intensif dan menyediakan SDM serta Anggaran yang memadai di Kecamatan
	3	Persentase Perangkat Daerah yang mampu menjabarkan target kinerjanya hingga jenjang individu	Persen	80%-85%	82,50%	12 Bulan	97%	OPD,Kecamatan perlu pendampingan yang erat tentang Tata Cara Menjabarkan Target Kinerja Individu	Mendampingi OPD, Kecamatan lebih Intensif dan menyediakan SDM serta Anggaran yang memadai di Kecamatan

Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan dengan merealisasikan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

- Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan Perangkat Daerah di Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan II.

  Sasaran Strategi tersebut diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran sebagaimana pada tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	WAKTU	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	SOLUSI
Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan Perangkat Daerah di Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan II	1	Persentase Renstra Perangkat Daerah berkualitas baik	Persen	80%-100%	75%	12 Bulan	75%	Perubahan RPJMD belum ditetapkan, sehingga untuk Verifikasi Ranhir RPJMD belum dapat	Percepatan Penetapan Perubahan RPJMD
	2	Persentase Renja Perangkat Daerah berkualitas baik	Persen	80%-85%	82,50%	12 Bulan	97%	RENJA Kecamatan masih perlu perbaikan dan perlu sosialisasi tentang Tata Cara Penyusunan	Mendampingi Penyusunan RENJA Kecamatan lebih intensif dan menyediakan SDM serta
	3	Persentase Perangkat Daerah yang mampu menjabarkan target kinerjanya hingga jenjang individu	Persen	80%-85%	82,50%	12 Bulan	97%	OPD,Kecamatan perlu pendampingan yang erat tentang Tata Cara Menjabarkan Target Kinerja Individu	Mendampingi OPD, Kecamatan lebih Intensif dan menyediakan SDM serta Anggaran yang memadai di Kecamatan

Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan dengan merealisasikan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

- Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan Perangkat Daerah di Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan III.

  Sasaran Strategi tersebut diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran sebagaimana pada tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	WAKTU	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	SOLUSI
Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan Perangkat Daerah di Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan III	1	Persentase Renstra Perangkat Daerah berkualitas baik	Persen	80%-100%	75%	12 Bulan	75%	Perubahan RPJMD belum ditetapkan, sehingga untuk Verifikasi Ranhir RPJMD belum dapat	Percepatan Penetapan Perubahan RPJMD
	2	Persentase Renja Perangkat Daerah berkualitas baik	Persen	80%-85%	82,50%	12 Bulan	97%	RENJA Kecamatan masih perlu perbaikan dan perlu sosialisasi tentang Tata Cara Penyusunan	Mendampingi Penyusunan RENJA Kecamatan lebih intensif dan menyediakan SDM serta
	3	Persentase Perangkat Daerah yang mampu menjabarkan target kinerjanya hingga jenjang individu	Persen	80%-85%	82,50%	12 Bulan	97%	OPD,Kecamatan perlu pendampingan yang erat tentang Tata Cara Menjabarkan Target Kinerja Individu	Mendampingi OPD, Kecamatan lebih Intensif dan menyediakan SDM serta Anggaran yang memadai di Kecamatan

Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan dengan merealisasikan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

- Meningkatkan hasil penelitian dan pengembangan daerah.

  Sasaran Strategi tersebut diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran sebagaimana pada tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	WAKTU	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	SOLUSI
Meningkatkan hasil penelitian dan pengembangan daerah	1	Prosentase Peningkatan Jumlah Kajian Penelitian Dan Pengembangan Daerah Yang Melibatkan Perangkat Daerah, Lembaga Penelitian, Pihak Swasta Dan Elemen Masyarakat	Persen	50%	0	12 Bulan	0%	Tidak tersedianya anggaran untuk mendukung pencapaian target kinerja	Perlu dukungan anggaran

Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan dengan merealisasikan Program Penelitian dan Pengembangan Wilayah.

- Meningkatkan hasil penelitian dan pengembangan daerah.

  Sasaran Strategi tersebut diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran sebagaimana pada tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	WAKTU	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	SOLUSI
Terbangunnya Budaya Inovasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah	1	Persentase Perangkat Daerah Dengan Kualitas Inovasi Terkait Isu Strategis Pemerintah	Persen	55%-60%	55%	12 Bulan	91%	Kurangnya kreativitas dari OPD terhadap inovasi daerah	Perlu dikalukan sosialisasi tentang pentingnya inovasi daerah
	2	Peningkatan Jumlah Usulan Inovasi Dari Perangkat Daerah	Persen	80%	30%	12 Bulan	38%	Belum menjadi prioritas daerah dalam kebijakan fiskal	Harus menjadi priorits dalam mendukung kebijkan pembangunan daerah

Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan dengan merealisasikan Program Penelitian dan Pengembangan Wilayah.

- Meningkatkan Minat Seluruh Perangkat Daerah Dalam Menciptakan Inovasi Yang Mampu Menjawab Isu Strategis Urusannya.

  Sasaran Strategi tersebut diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran sebagaimana pada tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	WAKTU	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	SOLUSI
Meningkatkan Minat Seluruh Perangkat Daerah Dalam Menciptakan Inovasi Yang Mampu Menjawab Isu Strategis Urusannya	1	Persentase Perangkat Paritisipasi Perangkat Daerah Dalam Membuat Inovasi Daerah	Persen	9%-10%	9%	12 Bulan	10%	Belum menjadi prioritas daerah dalam kebijakan fiskal	Perlu dukungan dengan anggaran dan harus menjadi prioritas dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah

Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan dengan merealisasikan Program Penelitian dan Pengembangan Wilayah.

- Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dalam penelitian dan pengembangan daerah Bidang Sosial dan Pemerintahan.

Sasaran Strategi tersebut diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran sebagaimana pada tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	WAKTU	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	SOLUSI
Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dalam penelitian dan pengembangan daerah Bidang Sosial dan Pemerintahan	1	Persentase Perangkat Daerah yang terlibat dalam penelitian dan pengembangan daerah Bidang Sosial dan Pemerintahan	Persen	6%	0%	12 Bulan	0%	Tidak tersedia anggaran untuk mendukung pencapaian target kinerja	Perlu dukungan anggaran
	2	Jumlah Lembaga Penelitian, Perguruan Tinggi (akademisi), Pihak Swasta dan Elemen Masyarakat yang bekerjasama dalam penelitian dan pengembangan daerah Bidang Sosial dan Pemerintahan	Jumlah	2	0%	12 Bulan	0%	Tidak tersedia anggaran untuk mendukung pencapaian target kinerja	Perlu dukungan anggaran

Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan dengan merealisasikan Program Penelitian dan Pengembangan Wilayah.

- Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dalam penelitian dan pengembangan daerah Bidang Perindustrian dan Perdagangan.

Sasaran Strategi tersebut diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran sebagaimana pada tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	WAKTU	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	SOLUSI
Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dalam penelitian dan pengembangan daerah Bidang Perindustrian dan Perdagangan	1	Persentase Perangkat Daerah yang terlibat dalam penelitian dan pengembangan daerah Bidang Perindustrian dan Perdagangan	Persen	6%	0%	12 Bulan	0%	Tidak tersedianya anggaran untuk mendukung pencapaian target kinerja	Perlu dukungan anggaran
	2	Jumlah Lembaga Penelitian, Perguruan Tinggi (akademisi), Pihak Swasta dan Elemen Masyarakat yang bekerjasama dalam penelitian dan pengembangan daerah Bidang Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah	2	0%	12 Bulan	0%	Tidak tersedianya anggaran untuk mendukung pencapaian target kinerja	Perlu dukungan anggaran

Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan dengan merealisasikan Program Penelitian dan Pengembangan Wilayah.

- Meningkatkan kualitas Perencanaan kinerja, dan keuangan OPD.

Sasaran Strategi tersebut diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran sebagaimana pada tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	WAKTU	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	SOLUSI
Meningkatkan kualitas Perencanaan kinerja, dan keuangan OPD	1	Jumlah kegiatan OPD yang target kinerjanja tercapai dengan baik	Dokumen	12	11	12 Bulan	91,667	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelengaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan belum berjalan maksimal	Perlunya alokasi anggaran untuk menunjang kegiatan
	2	Jumlah dokumen akuntabilitas dan kinerja	Dokumen	1	1	12 Bulan	100%	Waktu pelaksanaan pembuatan dokumen tersebut pada akhir tahun anggaran berkenaan	Sementara mengumpulkan bahan dalam penyusunan SAKIP OPD

Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan dengan merealisasikan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Abupaten/Kota.

- Meningkatkan kualitas kualitas tindak lanjut dan rekomendasi terkait saran dan perbaikan bidang pelayanan publik dan perencaaan.

  Sasaran Strategi tersebut diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran sebagaimana pada tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	WAKTU	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	SOLUSI
Meningkatkan kualitas kualitas tindak lanjut dan rekomendasi terkait saran dan perbaikan bidang pelayanan publik dan perencaaan	1	Jumlah dokumen perencanaan yang dilakukan penyesuaian tepat waktu	Dokumen	6	6	12 Bulan	100%	Kurangnya sarana dan prasarana penunjang penyusunan dokumen perencanaan	Perlunya pengadaan peralatan komputer yang memadai

Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan dengan merealisasikan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Abupaten/Kota.

- Meningkatkan kualitas pelayanan internal Dinas.

  Sasaran Strategi tersebut diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran sebagaimana pada tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	WAKTU	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	SOLUSI
Meningkatkan kualitas pelayanan internal Dinas	1	Jumlah PNS OPD yang kebutuhan hak-haknya terpenuhi tepat waktu	Orang	31	31	12 Bulan	100%	Pemenuhan berkas pendukung mengalami keterlambatan	Penyampaian/komuniksi dapat dibangun

Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan dengan merealisasikan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Abupaten/Kota.

- Meningkatkan kualitas pelayanan internal Dinas.

  Sasaran Strategi tersebut diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran sebagaimana pada tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	WAKTU	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	SOLUSI
Meningkatkan kualitas pelayanan bidang keuangan dinas	1	Jumlah dokumen bidang keuangan yang disusun/diselesaikan tepat waktu	Dokumen	12	12	12 Bulan	100%	Belum adanya Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuanga Daerah	Penetapan Prosedur Pengelolaan Keuanga Daerah

Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan dengan merealisasikan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Abupaten/Kota.

- Meningkatkan kualitas tindak lanjut dan rekomendasi terkait saran dan perbaikan pengelolaan keuangan.

  Sasaran Strategi tersebut diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran sebagaimana pada tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	WAKTU	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	SOLUSI
Meningkatkan kualitas tindak lanjut dan rekomendasi terkait saran dan perbaikan pengelolaan keuangan	1	Jumlah dokumen keuangan yang dilakukan penyesuaian tepat waktu	Dokumen	4	4	12 Bulan	100%	Penyusunan Laporan Keuangan sudah menggunakan SIPD, dan Aplikasi tersebut sering mengalami gangguan jaringan internet dan gangguan pada aplikasi	Perlunya mentanance aplikasi

Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan dengan merealisasikan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Abupaten/Kota.

- Meningkatnya kualitas SDM pengelola program dan kegiatan internal dinas.

  Sasaran Strategi tersebut diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran sebagaimana pada tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	WAKTU	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	SOLUSI
Meningkatnya kualitas SDM pengelola program dan kegiatan internal dinas	1	Jumlah PNS yang mendapatkan pelatihan sesuai kebutuhan dan kompetensi serta Bimbingan Teknis	Orang	2	2	12 Bulan	100%	Kurangnya penganggaran Bimbingan Teknis dan Diklat	Perlunya alokasi anggaran

Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan dengan merealisasikan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Abupaten/Kota.

- Meningkatkan kualitas pelayanan Kepegawaian.

  Sasaran Strategi tersebut diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran sebagaimana pada tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	WAKTU	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	SOLUSI
Meningkatkan kualitas pelayanan Kepegawaian	1	Jumlah PNS yang kebutuhan dokumen telah diajukan tepat waktu	Orang	31	31	12 Bulan	100%	Pengajuan berkas yang kurang lengkap	Perlunya perbaikan kelengkapan berkas
	2	Pangkat berkala	Orang	3	3	12 Bulan	100%	Pengajuan berkas yang kurang lengkap	Perlunya perbaikan kelengkapan berkas

Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan dengan merealisasikan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Abupaten/Kota.

- Meningkatkan kualitas pemeliharaan sarana prasarana internal dinas.

  Sasaran Strategi tersebut diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran sebagaimana pada tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	WAKTU	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	SOLUSI
Meningkatkan kualitas pemeliharaan sarana prasarana internal dinas	1	Prosentase aset bergerak/tidak bergerak dinas yang terpelihara dengan baik	Persen	15	12	12 Bulan	80%	Kurangnya penganggaran pemeliharaan aset	Perlunya alokasi anggaran

Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan dengan merealisasikan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Abupaten/Kota.

- Meningkatkan kualitas pelayanan bidang perencanaan program.

  Sasaran Strategi tersebut diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran sebagaimana pada tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	WAKTU	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	SOLUSI
Meningkatkan kualitas pelayanan bidang perencanaan program	1	Jumlah dokumen perencanaan disusun/diselesaikan tepat waktu	Dokumen	6	6	12 Bulan	100%	Terbatasnya data perencanaan OPD	Pembenahan/Penyediaan dokumen perencanaan

Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan dengan merealisasikan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Abupaten/Kota.

- Meningkatkan kualitas tindak lanjut dan rekomendasi terkait saran dan perbaikan bidang perencanaan.

  Sasaran Strategi tersebut diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran sebagaimana pada tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	WAKTU	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	SOLUSI
Meningkatkan kualitas tindak lanjut dan rekomendasi terkait saran dan perbaikan bidang perencanaan	1	Jumlah dokumen perencanaan dilakukan penyesuaian tepat waktu	Dokumen	4	4	12 Bulan	100%	Sumber Daya Manusia dibidang perencaaan masih terbatas	Perlunya penyediaan SDM perencanaan dan pelatihan

Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan dengan merealisasikan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Abupaten/Kota.

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Talaud adalah merupakan badan Perencana, Penelitian dan Pengembangan. Sebagai penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparat penyelenggaraan pemerintahan dibidang dan fungsi BAPELITBANG.

Laporan ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Periode 2020-2025. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Talaud mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Talaud. Semangat untuk mencapai visi dan misi diperlukan partisipasi dan komitmen dari seluruh aparat aparatur, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Laporan ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Badan Perencana, Penelitian dan Pengembangan diperlukan komitmen pejabat dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance* Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) khususnya di lingkungan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Talaud Kabupaten Kepulauan Talaud.
2. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* terhadap kinerja Perencana, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Talaud.
3. Komitmen pejabat pelaksana organisasi terhadap kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Talaud Kabupaten Kepulauan Talaud.

B. Saran

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Perencanaan Penelitian dan Pengembangan dan tugas pembantuan yang diberikan agar dilakukan dengan prinsip *good of goverment*.

Akhir kata, semoga Laporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Talaud ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

Sansiote sampate pate.

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KAB. KEPL. TALAUD,

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
BAPELITBANG

SPEN T. BAWANGUN, ST., MT
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197330707 200003 1 005